

## 762 Calhaj Purworejo Batal Berangkat

**PURWOREJO (KR)** - Sebanyak 762 calon jemaah haji (calhaj) Kabupaten Purworejo batal menunaikan ibadah ke tanah suci, menyusul keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purworejo Harwal Masyuda, Selasa (9/6) mengatakan penundaan direncanakan sampai tahun 2021. "Tahun depan mereka berangkat, sehingga secara otomatis berimbas pada jadwal tahun selanjutnya," jelas Harwal Masyuda. Menurutnya, pembatalan itu didasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji.

Faktor kesehatan dan keselamatan jemaah menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Calhaj Kabupaten Purworejo direncanakan berangkat pada periode periode 25 Juni 2020 hingga 25 Juli 2020. Mereka rencananya akan terbagi dalam kloter 29, 30, dan 31. Menurutnya, 762 calhaj itu terdiri atas 623 calon ditambah 139 calhaj yang melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahap kedua. Terkait BPIH yang telah dibayarkan, akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). **(Jas)-o**

## Diserahkan, Bantuan Hibah Keagamaan

**MAGELANG (KR)** - Pemkab Magelang menyerahkan bantuan hibah keagamaan kepada 11 organisasi keagamaan di Kabupaten Magelang. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Magelang, Edi Cahyana di ruang rapat Wakil Bupati Magelang, kompleks Setda Kabupaten Magelang, Kamis (11/6). "Pemberian dana hibah ini merupakan refleksi dari kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan komitmen 'Sedaya Amanah' melalui penguatan lembaga keagamaan dan sarana keagamaan agar lebih berdaya dalam menjalankan program-program yang berdimensi peningkatan kualitas aqidah umat," kata Edy.

Selaras dengan program pemerintah tersebut, lanjut Edy, dirinya mengingatkan kepada para penerima bantuan hibah tahun 2020 ini mampu melaksanakan prinsip tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib waktu. "Administrasinya harus terpenuhi, peruntukan anggaran harus terinci dan penyampaian pertanggungjawaban pun harus tepat waktu," pintanya. Untuk diketahui dalam kesempatan kali ini, Pemkab Magelang menyerahkan bantuan hibah keagamaan Kabupaten Magelang tahun 2020 berupa dana sebesar Rp 11.131.000.000 kepada 11 organisasi keagamaan di wilayah ini. **(Bag)-o**

## Diskusi Pemilukada PascaCovid-19

**SEMARANG (KR)** - Pusat Kajian HAM dan Antikorupsi beserta Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Media Fakultas Hukum dan Komunikasi (FHK) Unika Soegijapranata menyelenggarakan seminar online (Webinar) 'Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pemilukada PascaCovid-19' di kampus setempat, Rabu (10/6). Acara dipandu Dr Antonius Maria Laot Kian MHum (Ketua Pusat Kajian HAM dan Antikorupsi FHK Unika Soegijapranata) menghadirkan narasumber Drs Andreas Pandiangan MSi (Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Media FHK Unika Soegijapranata), Oky Pitoyo Leksono SH (Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang), Ronny Maryanto R (Kordiv Korupsi Politik dan Anggaran KP2KKN Jateng), serta menghadirkan dalam ruang virtual Unika Yulianus Payzon Aituru (Bakal Calon Bupati Kabupaten Asmat). Dr Anton Laot menjelaskan perlunya beberapa langkah antisipasi yang diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah agar pelaksanaan pemilukada serentak yang akan datang dapat berjalan lancar.

Pemilukada bakal dipengaruhi situasi yang berkembang saat ini yaitu masa pandemi covid-19, mulai dari pendaftaran bakal calon, protokol masa kampanye dan hal penting lainnya seperti pelaporan dana kampanye. Andreas Pandiangan dalam kajian kebijakan publik dan media mengungkap perlu adanya transparansi pelaporan yang dilakukan peserta pemilukada. **(Sgi)-o**

## Butuh Perda Perlindungan Anak Yatim

**PURWOREJO (KR)** - Guna melindungi kehidupan para anak yatim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo butuh Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yatim. Perda diharap dapat menjamin keterlindungan dan kesejahteraan anak yatim sekaligus para pengasuh panti asuhan yang merawatnya. "Biaya operasional panti selama ini mengandalkan donatur serta bantuan pemerintah. Itupun baru untuk pemenuhan kebutuhan dasar," kata Kepala Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah Kaligesing Kabupaten Purworejo H Mukidal, Kamis (11/6). Di hadapan anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil 2 DPRD Purworejo yang mengunjunginya, H Mukidal menjelaskan bahwa bantuan anggaran yang diterimanya jika dirata-rata maka setiap anak Rp 5.000 per hari. Bahkan tahun ini dari 30 lebih anak yang disusulkan, hanya 20 yang disetujui.

Bantuan itu diakuinya masih sangat minim. Terlebih jika dibandingkan dengan panti asuhan yang dikelola pemerintah, yang jumlah bantuannya mencapai Rp10 ribu per hari per anak. "Kami istilahkan bantuan untuk makan. Tapi kami bukan iri atau protes karena memang tujuan utama kami melaksanakan perintah agama untuk memelihara anak-anak yatim," tandasnya. **(Nar)-o**



Para anggota F PDIP Purworejo saat mengunjungi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kaligesing.



**PURWOREJO (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo mulai hari ini, Jumat (12/6) secara resmi mengakhiri masa tanggap darurat Covid-19, sekaligus menapaki kehidupan (kebiasaan) baru atau New Habit. "Kalau Purworejo membutuhkan bukan new normal, tapi New Habit atau kebiasaan baru dengan tetap

## HARI INI PURWOREJO MENAPAKI NEW HABIT Akhir Masa Tanggap Darurat Covid-19

menerapkan protokol kesehatan. Tetap pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak fisik," kata Bupati Purworejo H Agus Bastian SE MM.

Kebijakan ini diterapkan dengan pertimbangan bahwa tidak adanya kasus positif Covid-19 secara signifikan dan selama ini tidak ada kasus murni Covid-19 yang meninggal dunia. "Dengan ini maka masa tanggap darurat Covid-19 secara resmi berakhir," tandasnya.

Dengan diperlukannya New Habit ini menurut Agus Bastian yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Hj Yuli Hastuti SH, tidak ada lagi jalan-jalan yang ditutup, namun dalam kehidupan se-

hari-hari warga tetap diminta untuk melakukan protokol Covid-19.

Ibadah di masjid tetap mengikuti anjuran Kementerian Agama, dan kehidupan di pasar tetap memenuhi prosedur kesehatan. "Tempat-tempat usaha mulai buka, dan pelayanan umum akan dibuka secara bertahap," jelasnya seraya mengemukakan warga yang sakit harus segera berobat dan tetap berada di rumah.

Dalam menghadapi New Habit ini menurut Juru Bicara Protokol Covid-19 Kabupaten Purworejo dr Tolcha Amaruddin Sp THT KL, sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. "Kendala utama yang

kita hadapi itu pada kedisiplinan masyarakat dalam menghadapi kehidupan sehari-hari atau adaptasi kehidupan baru," jelasnya.

Diakui pula bahwa sela-

ma ini pasien positif Covid-19 di Purworejo 90 persen tidak ada gejala. "Yang ada gejala justru cluster RSUD Dr Tjitrowardojo," katanya.

**(Nar)-o**



Bupati Agus Bastian didampingi Wabup Yuli Hastuti dalam keterangannya menyambut new habit.

## TERHADAP WARGA TERDAMPAK COVID-19

# Sekolah Diminta Terapkan 'Tepa Slira'

**KEBUMEN (KR)** - Banyak warga masyarakat, termasuk di Kebumen mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang sulit sebagai dampak dari berlangsungnya pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Khusus menjelang dimulainya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021, muncul kecamasan sebagian warga terdampak pandemi Covid-19 yang akan memasukkan anak mereka ke sekolah baru. Mereka cemas terhadap kemungkinan adanya pungutan oleh sekolah baru.

"Terhadap kecemasan warga masyarakat itu, kami sudah mengambil langkah antisipasi de-

ngan meminta agar sekolah 'tepa slira' atau bertoleransi terhadap kesulitan masyarakat tersebut," ujar Plt Sekretaris Dinas Pendidikan (disdik) Kebumen, Putut Supriyadi SPi, Rabu (10/6).

Langkah antisipasi tersebut dengan mengirimkan surat imbauan kepada sekolah-sekolah di Kebumen agar mereka mau memahami sepenuhnya kesulitan ekonomi masyarakat saat ini.

Untuk semua sekolah negeri tanpa kecuali diminta agar tak ada pungutan apapun terhadap para siswa baru mereka. "Kami meminta agar sekolah berempati terhadap kondisi masyarakat saat ini, namun secara teknis kami tak merinci bentuk empati tersebut," ujar Putut.

Kendati tak membolehkan adanya pungutan terhadap siswa baru, namun bila ada sumbangan sukarela ke sekolah dari orang tua siswa maupun warga masyarakat yang mampu secara ekonomi, sekolah diperbolehkan menerimanya. Adapun jadwal PPDB

2020/2021 Kebumen untuk TK, SD dan SMP negeri dan SMP swasta dengan sistem daring (dalam jaringan) dimulai 17 Juni sampai 19 Juni 2020. Untuk SD swasta 17 Juni sampai 30 Juni 2020. Untuk SMP swasta luar jaringan 17 Juni sampai 30 Juni 2020.

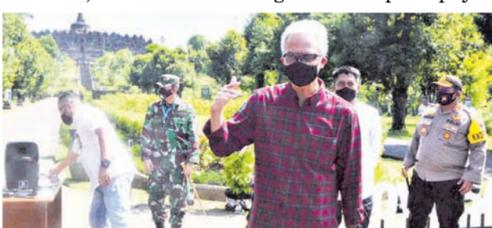
"Tentang hari pertama masuk sekolah atau tahun ajaran baru untuk sementara berdasarkan kalender pendidikan yang sudah ada, yaitu 13 Juli 2020. Namun masih bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah pusat nantinya," ujar Putut. **(Dwi)-o**

## Wisatawan Harus Ikuti Protokol Kesehatan

**MAGELANG (KR)** - Simulasi pra operasional penerapan standar New Normal di kawasan Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dilaksanakan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Rabu (10/6). Kegiatan memperoleh perhatian Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kepala Dinas Pariwisata Jateng Sinoeng Nugroho Rachmadi, Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, Kapolres Magelang AKBP Roland Ardiyanto Purba SIK Msi, Komandan Ko-

dim 0705/Magelang Letkol Czi Anto Indriyanto SSos, dan Kasi Konservasi Balai Konservasi Borobudur (BKB) Yudi Suhartono.

Penerapan standar New Normal pariwisata di destinasi TWC untuk seluruh wisatawan yang masuk, kata Direktur Utama PT TWC Edy Setijono, harus mengikuti protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan, melewati chamber disinfektan, pengecekan suhu tubuh, melakukan visitor management dengan menerapkan physi-



Dirut PT TWC saat memberikan keterangan kepada wartawan, didampingi Gubernur Jateng, Bupati Magelang, Kapolres Magelang, Komandan Kodim 0705/Magelang dan Kasi Konservasi BKB.

cal distancing, meminimalis pembayaran dengan cash atau cashless, menyediakan hand washing di beberapa stations, pemasangan signage dan information board protocol Covid-19 serta mempersiapkan klinik kesehatan untuk wisatawan yang sakit.

Setelah melakukan simulasi penerapan standar 'New Normal' tersebut, akan dilakukan evaluasi dan hasilnya akan dilaporkan, baik ke Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata serta ke pemerintah daerah terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa destinasi sudah siap dalam menerima wisatawan di masa pandemi Covid-19.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah banyak menerima keluhan dari beberapa pihak, mau wisata sendiri mengeluh karena sudah kelamaan di rumah, ternyata menyaksikan tayangan video di rumah tidak cukup. **(Tha)-o**

## Prioritaskan Penanganan Rob di 6 Kabupaten

**SEMARANG (KR)** - Komisi D DPRD Jateng minta kepada Pemprov Jateng agar memprioritaskan penanganan rob di enam Kabupaten/Kota yang terdampak serius. Prioritas harus tercermin dalam kebijakan anggaran maupun dalam hal koordinasi lintas sektor. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso kepada wartawan di Semarang, Kamis (11/6).

Hasil monitoring penanggulangan rob wilayah kota Pekalongan dan Kab Demak, Hadi menilai kebijakan anggaran pemprov terlihat masih setengah-setengah, jauh dari ideal. Kebijakan tersebut berbeda jauh jika dibanding dengan saat pemprov menencanakan tahun infrastruktur jalan dan jembatan beberapa tahun lalu. Dalam catatan Hadi, pada kurun waktu tiga tahun berturut-turut penanggulangan tanggul pantai maupun perbaikan saluran di daerah rob anggarannya tidak pernah lebih dari Rp 50 miliar tiap tahunnya untuk seluruh Jateng.

"Idealnya setiap tahun minimal Rp 175 miliar untuk program perbaikan tanggul pantai, perbaikan saluran, serta perbaikan sistem pompa di Jateng. Kita belajar dari Kota Semarang, ketika koordinasi lintas OPD dan Instansi berjalan, dana disupport ternyata sangat terasa pengurangan dampaknya, menurun drastis cakupan wilayahnya" tutur Hadi Santoso.

Hadi minta kepada pemerintah agar program penanganan rob di Jawa Tengah menjadi prioritas 2021 baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Demak khususnya Sayung, penanganan permanen realisasi Seksi 1 Tol Semarang-Demak, Pekalongan sesuai Perpres 79/2019 penanganan rob terintegrasi Percepatan Ekonomi Brebres - Kendal. Ini tinggal serius atau tidak pemerintah, karena payung hukumnya sudah ada," tegasnya. Kondisi tahun ini menurut Hadi memang sangat memprihatinkan. **(Bdi)-o**

## Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Dijadikan Perda

**BOYOLALI (KR)** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali menggelar rapat Paripurna Penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019, Rabu (10/6) di ruang sidang gedung DPRD setempat. Agenda sidang penyampaian pendapat akhir Bupati Boyolali dan fraksi DPRD Boyolali terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dan dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.

Masing-masing fraksi, mulai Fraksi PDIP dibacakan Joko Maryanto menyetujui Ranperda tersebut dengan memberikan saran kepada Pemkab Boyolali agar memanfaatkan

silpa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Tidak beda dengan Fraksi PDIP, Fraksi Karya Bangsa dan Fraksi Indonesia Adil Sejahtera juga menyampaikan persetujuan tentang Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda. Sementara itu Bupati Boyolali, Seno Samodro menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sumbang pemikiran dalam agenda sidang paripurna kali ini.

"Terima kasih atas kesempatan dan kerjasama dewan yang terhormat, persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan persyaratan wajib untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda dan setelah mendengar dan menyimak serta memperhatikan, Alhamdulillah mayoritas setuju untuk disampaikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,"

katanya.

Seno Samodro menyampaikan Ranperda ini didasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jateng namun dalam pembahasan badan anggaran rapat komisi dan

Fraksi masih banyak yang harus disempurnakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Ketua DPRD Boyolali S Paryanto mengungkapkan di dalam laporan pertanggungjawaban ini, pihaknya mengapresiasi Pem-

kab Boyolali telah sembi-

lan kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Telah dibahas bersama dari LHP BPK RI Perwakilan Jateng boleh dikatakan hampir tidak ada rekomendasi," tegas Paryanto.

**(\*-1)-o**



Bupati Boyolali dan Ketua DPRD Boyolali menandatangani berita acara persetujuan bersama.